

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PR.02.01/7.3/PKTN.6.3/Perkin/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aribianto
Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Tommy Andana
Jabatan : Direktur Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua
Direktur Tertib Niaga



Tommy Andana

Pihak Pertama
Kepala BPTN Surabaya



Aribianto

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA**

Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga

No	Sasaran Kegiatan Eselon II	Sasaran Kegiatan Eselon III	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Prediksi Capaian (Kumulatif)			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan di wilayah kerja BPTN Surabaya	548	Produk/ Berita Acara	16	44	77	100
				25	Lembaga	20	60	80	100
				50	Orang	-	-	100	100

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Prediksi Capaian (Kumulatif)			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran BPTN Surabaya	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya	92	Satuan	-	-	-	100

Anggaran:

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Satuan RO	Anggaran (Rp)
(1)	(2)			(3)
3992	Peningkatan Tertib Niaga			2.150.000.000
3992.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			
3992.AEF.023	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	50	orang	50.000.000
3992.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
3992.QIA.024	Pengawasan Post Border	548	produk	2.000.000.000
3992.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
3992.QIC.025	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	25	lembaga	100.000.000
3977	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN			1.020.000.000
3997.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
3977.CAN.021	Pengadaan Perangkat TIK	6	Unit	63.344.000
3977.CCL	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
3977.CCL.021	Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	8.640.000
3977.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
3977.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	120.000.000
3977.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	828.016.000
Total				<u>3.170.000.000</u>

Direktur Tertib Niaga



Tommy Andana

Jakarta, Desember 2023
Kepala BPTN Surabaya


Aribianto

MATRIKS RENCANA AKSI 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

KEGIATAN: PENINGKATAN TERTIB NIAGA

Level Kinerja	Kode	Uraian	Target	Satuan	Pagu	Rencana Aksi Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran	01	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya							
Indikator Kinerja	1.1	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan di wilayah kerja BPTN Surabaya							
Rincian Output	3992.AEF.023	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	50	Orang	50,000,000				
Komponen	051	Menyelenggarakan Edukasi Pelaku Usaha Terkait Kegiatan Perdagangan							
Aktivitas	A	Menyelenggarakan Diseminasi dan Publikasi Tertib Niaga BPTN Surabaya			50,000,000	Kegiatan belum mulai	Perencanaan	Pelaksanaan	Selesai
Rincian Output	3992.QIA.024	Pengawasan Post Border	548	Produk	873,120,000				
Komponen	051	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Post Border							

Aktivitas	A	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Post Border			60,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Selesai	Selesai
Komponen	052	Melakukan Pengawasan Post Border			1,940,000,000				
Aktivitas	B	Melakukan Pengawasan Post Border			927,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Aktivitas	C	Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Partisipasi Kegiatan Pengawasan Post Border BPTN Surabaya			161,679,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
	D	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			676,638,000	Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Aktivitas	E	Operasional Analyzing Point Post Border BPTN Surabaya			174,682,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Rincian Output	3992.QIC.025	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	25	Lembaga	100,000,000				
Komponen	053	Melaksanakan Pengawasan Khusus Kegiatan Perdagangan			100,000,000				
Aktivitas	A	Melaksanakan Pengawasan Khusus BPTN Surabaya			100,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PKTN

Sasaran	01	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran BPTN Surabaya							
Indikator Kinerja	1.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya							
Rincian	3977.CAN.021	Pengadaan Perangkat	4	Unit	50,000,000				

Output		TIK							
Komponen	051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi							
Aktivitas	A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPTN Surabaya	4	Unit	50,000,000	Perencanaan	Pelaksanaan	Selesai	Selesai
Rincian Output	3977.CCL.021	Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	8,640,000				
Komponen	051	Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
Aktivitas	A	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12	Unit	8,640,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Rincian Output	3977.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	120,000,000				
Komponen	051	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran			7,310,000				
Aktivitas	A	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran			7,310,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			7,065,000				
Aktivitas	B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			7,065,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			6,975,000				
Aktivitas	C	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			6,975,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	054	Pengelolaan Kepegawaian			10,900,000				
Aktivitas	D	Pengelolaan Kepegawaian			10,900,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai

Komponen	055	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan			87,750,000				
Aktivitas	E	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan			87,750,000	<i>Perencanaan dan Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan dan Selesai</i>
Rincian Output	3977.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	828,016,000				
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			828,016,000				
Aktivitas	A	Honorarium Satuan Kerja BPTN Surabaya			106,000,000	<i>Perencanaan dan Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan dan Selesai</i>
Aktivitas	B	Operasional Perkantoran dan Pimpinan BPTN Surabaya			721,336,000	<i>Perencanaan dan Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan dan Selesai</i>

FORMULIR INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Rincian Output	:	Jumlah Pengawasan Post Border
4.	Definisi Operasional	:	1) Pengawasan post border dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, dimana importir wajib memenuhi persyaratan impor terhadap barang tersebut, yaitu kewajiban mencantumkan dengan benar nomor dan tanggal dokumen Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selain itu pemeriksaan dilakukan pula terhadap jumlah atau volume impor barang. 2) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, semua provinsi di pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. 4) Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan post border antara lain : - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
5.	Target	:	548 produk/Berita Acara
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah Berita Acara pengawasan post border yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
7.	Sumber Data	:	1. Direktorat Tertib Niaga 2. Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember, dihitung per triwulan

FORMULIR INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Rincian Output	:	Jumlah pengawasan kegiatan perdagangan
4.	Definisi Operasional	:	1) Kegiatan pengawasan perdagangan merupakan pengawasan kegiatan perdagangan yang diselenggarakan sesuai Pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, semua provinsi di pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. 4) Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan antara lain: - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
5.	Target	:	25 lembaga
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan sesuai ketentuan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan
7.	Sumber Data	:	1. Direktorat Tertib Niaga 2. Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember, dihitung per triwulan

FORMULIR INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Rincian Output	:	Jumlah pelaku usaha yang diedukasi
4.	Definisi Operasional	:	1) Pelaku Usaha adalah pelaku kegiatan di bidang perdagangan. 2) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, semua provinsi di pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. 4) Tugas dan fungsi BPTN salah satunya adalah melakukan kerja sama dan kehumasan terhadap stakeholder terkait mengenai peraturan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan. 5) Dasar hukum dalam pelaksanaan edukasi/diseminasi antara lain : - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
5.	Target	:	50 pelaku usaha
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah pelaku usaha yang hadir baik secara daring maupun luring pada kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi BPTN Surabaya
7.	Sumber Data	:	Laporan kegiatan edukasi pelaku usaha kegiatan perdagangan
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember

FORMULIR INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

1.	Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN BPTN Surabaya
3.	Indikator Rincian Output	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya
4.	Definisi Operasional	:	1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. 2) Pengukuran IKPA dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3) Pengukuran IKPA meliputi aspek: a. Kualitas perencanaan anggaran; b. Kualitas pelaksanaan anggaran; dan c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
5.	Target	:	92 (satuan)
6.	Cara Perhitungan	:	Nilai IKPA diperoleh dari penjumlahan nilai indikator pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja dibagi dengan konversi bobot. Adapun bobot maupun indikator dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan terkait Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.
7.	Sumber Data	:	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OMSPAN) Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
8.	Periode Pengukuran	:	Penilaian IKPA dilakukan setiap triwulan. Nilai IKPA pada target adalah IKPA pada akhir tahun (Bulan Desember)

Jakarta, Desember 2023

Kepala BPTN Surabaya


Ariyanto